



2022

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

LPPD

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
DAERAH



BKPSDM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan masukan penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Tanah Laut yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut.

LPPD ini secara garis besar menngambarkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan sarana dan prasarana serta personil yang dimiliki mencakup realisasi belanja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pada Tahun Anggaran 2022. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dengan tujuan memenuhi target Kinerja yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini secara sistematis berdasarkan hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun anggaran 2022.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630808 198602 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. DASAR HUKUM 1

 1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 2

 1.3. DATA UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA 11

 2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 11

 2.2. REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022 12

BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 20

 3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 20

 3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2021) 34

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 35

 4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN..... 35

 4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA
PENYELESAIAN..... 35

BAB V PENUTUP 36



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB I

PENDAHULUAN



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi untuk membantu Bupati untuk merumuskan Kebijakan di bidang Kepegawaian ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Penggantian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut didasari oleh ketentuan tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, yang mengamanatkan bahwa penyetaraan Jabatan dilakukan pada Instansi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan tugas utama dalam manajemen kepegawaian daerah adalah meningkatkan Indeks Profesional ASN. Untuk menggambarkan kinerja urusan pemerintah daerah yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut maka dituangkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022.

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mengacu pada dasar hukum Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023, sebagai berikut:

Visi :
Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BerInTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi).

- Misi :**
- 1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
 - 2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
 - 3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).**
 - 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
 - 5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap Misi ke 3 (ketiga).

- | | |
|--------------------------|---|
| Misi Ke-3 (tiga), yakni | : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(<i>Good Governance</i>) |
| Tujuan ke-1 (satu) yakni | : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi |
| Sasaran ke 1.1 yakni | : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik |
| Indikator Sasaran | : Indeks Reformasi Birokrasi |

Tabel 1.1.

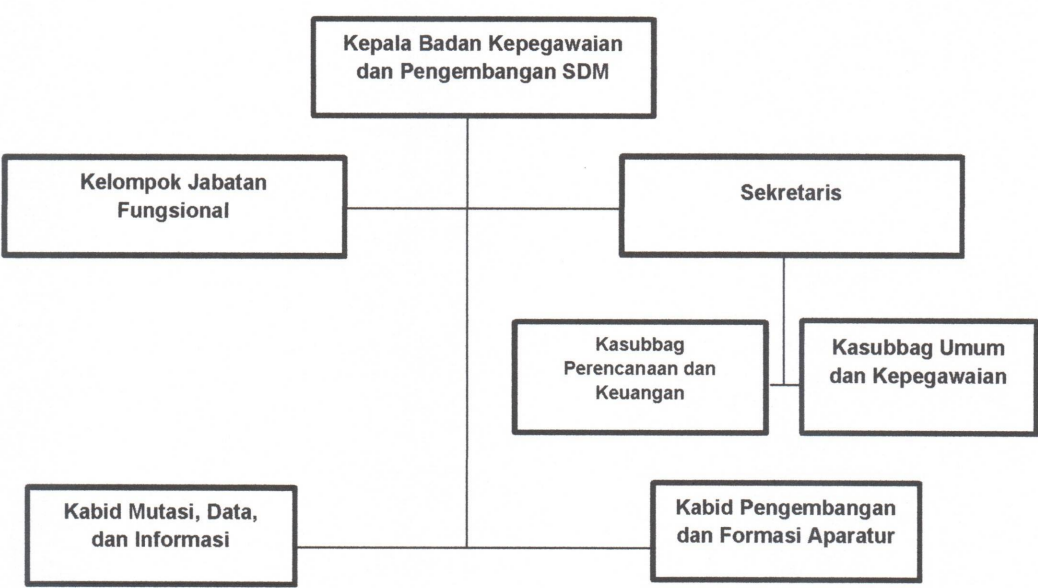
Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Visi	Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)		
Misi ke 3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat 2. Berusaha Meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal 3. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di Lingkungan BKPSDM

1.3. DATA UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2022

Dari bagan struktur organisasi di atas sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
 - 2. Sekretaris membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur.
 - 4. Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi.
1. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- h. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Mutasi, Data, dan Informasi

Bidang Mutasi, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan mutasi dan promosi, kepangkatan, disiplin dan penghargaan aparatur, penyiapan data dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi, Data, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mutasi, data dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
- c. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- e. Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- f. Pemverifikasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;

- g. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- h. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- i. Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- j. Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
- k. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
- l. Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;
- m. Penyiapan dan penyajian data dan informasi;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur

Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan diklat aparatur, formasi dan pengadaan, penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan dan formasi aparatur;
- b. Perumuskan kebijakan pengembangan diklat aparatur;
- c. Penyelenggaraan pengembangan diklat aparatur;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan formasi dan pengadaan;
- e. Perencanaan kebutuhan diklat dan non diklat;
- f. Fasilitasi pelaksanaan profesi aparatur;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- h. Perumusan kebijakan formasi dan pengadaan;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- j. Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- l. Memverifikasi dokumen administrasi;
- m. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

- n. Fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
- o. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kepegawaian

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jumlah pegawai sebanyak 46 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 31 orang dan Non PNS sebanyak 15 orang yang terdiri darip:

- Golongan IV sebanyak : 3 orang
- Golongan III sebanyak : 21 orang
- Golongan II sebanyak : 7 orang
- Golongan I sebanyak : 0 orang
- Non PNS/PTT : 15 orang

Jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari:

• Pendidikan S.2	:	4	orang
• Pendidikan S.1	:	13	orang
• Pendidikan D. III	:	10	orang
• Pendidikan SLTA	:	4	orang
• Pendidikan SLTP	:	0	orang
• Pendidikan SD	:	0	orang

PNS Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf:

• Eselon II b	:	1	orang
• Eselon III a	:	1	orang
• Eselon III b	:	2	orang
• Eselon IV a	:	2	orang
• Widyaiswara Ahli Pertama	:	0	orang
• Analis Kepegawaian Muda	:	6	orang
• Arsiparis Pertama	:	1	orang
• Pranata Komputer Pertama	:	0	orang
• Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	:	0	orang
• Staf	:	18	orang

Permasalahan bidang Kepegawaian yang Menjadi Tanggung Jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Antara Lain:

1. Alokasi Dan Distribusi PNS belum merata;
2. Jumlah dan Kualitas PNS belum memadai sesuai kebutuhan Jabatan;
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan masih kurang sesuai standart Kompetensi Jabatan, Kualifikasi dan perlu adanya pola pembinaan Karier PNS;
4. Penyusunan Analisis Kebutuhan pendidikan dan Pelatihan yang masih belum mengakomodir kebutuhan Diklat Aparatur Pemerintah daerah;
5. Pemetaan kebutuhan, pengelolaan serta pengembangan aparatur pemerintah daerah yang belum tersusun secara sistematis;
6. Kinerja PNS masih perlu ditingkatkan, Khususnya tingkat kedisiplinan Pegawai.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menetapkan Sasaran Strategis dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yakni:

➤ **Sasaran Strategis:**

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
2. Tersedia nya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standart Kompetensi
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

➤ **Arah Kebijakan:**

1. Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat
3. Meningkatkan kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal
4. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di Lingkungan BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan misi BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian.

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 **memuat 3 (tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan, 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan**, yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang – bidang lainnya, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada Renstra BKPSDM. Sedangkan tujuannya untuk dapat menjabarkan dari visi dan misi yang telah disepakati, seimbang dengan sarana yang ingin dicapai yakni peningkatan SDM untuk dapat Meningkatkan Indek Profesional ASN.

2.2. REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 2.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022

No .	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)
KEPEGAWAIAN						7,879,052,083			102.86 %	6,436,237,601	1,442,814,482	81.69 %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					6,564,061,908			99.00%	5,484,689,527	1,079,372,381	83.56 %
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9,029,435			100.00 %	7,656,300	1,373,135	84.79 %
	Sub Kegiatan :											
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (RENJA, RENSTRA, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6	Dok	4,981,240	6	Dok	100.00%	4,446,300	534,940	89.26%
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, RB, ZI, LPPD, dan LKPD	5	Dok	4,048,195	5	Dok	100.00%	3,210,000	838,195	79.29%

II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,803,525,947			100.00 %	4,447,256,820	356,269,127	92.58 %
	Sub Kegiatan :											
	3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKPSDM	37	Orang / Bulan	4,795,269,745	12	Bulan	100.00%	4,440,410,220	354,859,525	92.60%
	4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1	Dok	8,256,202	1	Dok	100.00%	6,846,600	1,409,602	82.93%
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara	4	Dok		4	Dok	100.00%			
Jumlah Verifikasi			2	Verifikasi	2		Verifikasi	100.00%				
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,067,570,730			95.00%	409,647,171	657,923,559	38.37 %
	Sub Kegiatan :											
	5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	6	Jenis	3,467,245	6	Jenis	100.00%	2,348,000	1,119,245	67.72%
	6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	736,528,326	4	Jenis	80.00%	91,248,000	645,280,326	12.39%
	7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	9	Jenis	86,624,159	9	Jenis	100.00%	75,577,700	11,046,459	87.25%
	8.		Jumlah Rapat	11	Kali	240,951,000	11	Kali	100.00%	240,473,471	477,529	99.80%

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah dan Luar Provinsi.	12	Bulan		12	Bulan	100.00%			
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					563,845,817			100.00 %	511,643,736	52,202,081	90.74 %
	Sub Kegiatan :											
	9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	12	Rekening	175,114,201	12	Bulan	100.00%	129,449,296	45,664,905	73.92%
	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	24	Jenis	388,731,616	24	Jenis	100.00%	382,194,440	6,537,176	98.32%
			Jumlah Jenis Bibit Tanaman	1	Jenis		1	Jenis	100.00%			
			Jumlah Laporan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang Terlayani	12	Laporan		12	Laporan	100.00%			
Jumlah Tenaga Non PNS			15	Orang	12		Bulan	100.00%				
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120,089,979			100.00 %	108,485,500	11,604,479	90.34 %

		Sub Kegiatan :										
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	9	Buah/ Tahun	37,160,000	9	Buah/ Tahun	100.00%	37,057,000	103,000	99.72%
			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun		4	Buah/ Tahun	100.00%			
	12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang dipelihara	17	Jenis	33,134,200	17	Jenis	100.00%	27,015,000	6,119,200	81.53%
	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	2	Jenis	49,795,779	2	Jenis	100.00%	44,413,500	5,382,279	89.19%
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,314,990,175			106.72 %	951,548,074	363,442,101	72.36 %
	VI	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				389,300,007			124.22 %	198,652,925	190,647,082	51.03 %
		Sub Kegiatan :										
	14	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	8,052,902	1	Dok	100.00%	5,024,925	3,027,977	62.40%
	15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon ASN yang Diterima	150	Orang	223,526,794	259	Orang	172.67%	41,885,000	181,641,794	18.74%

		16	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian yang Dipelihara	6	Aplikasi Kepegawaian	157,720,311	6	Aplikasi	100.00%	151,743,000	5,977,311	96.21%
				Jumlah Dokumen Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian	4	Dok		4	Dok	100.00%			
	VII	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					460,888,156			96.71%	313,214,749	147,673,407	67.96%
		Sub Kegiatan :											
		17	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	1000	Orang	224,457,443	979	Orang	97.90%	120,081,749	104,375,694	53.50%
				Jumlah Mutasi Keluar / Masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	30	Orang		29	Orang	96.67%			
				Jumlah Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	600	Orang		379	Orang	63.17%			

			Pelaksana dan Jabatan Fungsional									
	18	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala	1500	Orang	114,940,713	1,792	Orang	119.47%	108,358,000	6,582,713	94.27%
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN	600	Orang		774	Orang	129.00%			
	19	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5	Orang	121,490,000	4	Orang	80.00%	84,775,000	36,715,000	69.78%
VII I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					440,140,000			98.75%	419,406,400	20,733,600	95.29%
	Sub Kegiatan :											
	20	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Diikutkan Assesment	25	Orang	125,140,000	25	Orang	100.00%	122,856,400	2,283,600	98.18%
	21	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	40	Orang	315,000,000	39	Orang	97.50%	296,550,000	18,450,000	94.14%

			Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar	2	Orang		2	Orang	100.00%			
IX	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					24,662,012			107.18 %	20,274,000	4,388,012	82.21 %
	Sub Kegiatan :											
	22	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Satyalencana	350	Buah	24,662,012	212	Buah	60.57%	20,274,000	4,388,012	82.21%
			Jumlah SK CTLN (Cuti di Luar Tanggungan Negara)	4	SK		0	SK	0.00%			
			Jumlah SK Hukuman Disiplin	10	SK		4	SK	40.00%			
			Jumlah SK Izin Perceraian	10	SK		18	SK	180.00%			
			Jumlah SK Pensiun (Janda/Duda/Yatim)	150	SK		202	SK	134.67%			
			Jumlah Surat Cuti (Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting)	140	Surat		319	Surat	227.86%			

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							979,324,244			92.86%	846,592,740	132,731,504	86.45 %
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						979,324,244			92.86%	846,592,740	132,731,504	86.45 %
	X	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					979,324,244			92.86%	846,592,740	132,731,504	86.45 %
		Sub Kegiatan :											
		23	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	0	Orang	979,324,244				846,592,740	132,731,504	86.45%
				Jumlah Peserta Diklat Teknis	14	Orang		12	Orang	85.71%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	152	Orang		152	Orang	100.00%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0	Orang							
	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimipinan Nasional Tk. II			0	Orang								
						8,858,376,327			97.86%	7,282,830,341	1,575,545,986	82.21 %	



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 130/3425/PEM/2022 Perihal Permintaan Dokumen LKPJ, Tabel IKK LPPD, Laporan Penerapan SPM Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2022 serta Penginputan IKK *Outcome* dan IKK *Output* LPPD ke e-LPPD Kabupaten Tanah Laut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut diwajibkan untuk menyampaikan data capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu urusan Kepegawaian. Terdapat 3 (tiga) *Outcome* Indikator kunci yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dimana out come dan capaian kinerjanya yaitu:

1. IKK *Outcome*

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas / Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah X 100%
Capaian Kinerja	1173 / 531 X 100% = 220,90%

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) X 100%
Capaian Kinerja	349 / 1704 X 100% = 20,48%

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) X 100%
Capaian Kinerja	179 / 349 X 100% = 51,29%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 **memili 3 (tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan, 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan**, dengan nilai pagu anggaran sebesar **Rp. 8.858.376.327,-** telah diserap atau direalisasikan sebesar **Rp. 7.282.830.341,-** dengan persentase **82,21%** dengan kondisi anggaran **SILPA** sebesar **Rp. 1.575.545.986.**

Berikut merupakan capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2022

No.	Urusan Pemerintahan Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Penunjang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						99.00%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.00%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (RENJA, RENSTRA, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6	Dok	6	Dok	100.00%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, RB, ZI, LPPD, dan LKPD	5	Dok	5	Dok	100.00%			

2. Berusaha Meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100.00%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKPSDM	37	Orang / Bulan	12	Bulan	100.00%			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1	Dok	1	Dok	100.00%			
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara	4	Dok	4	Dok	100.00%			
		Jumlah Verifikasi	2	Verifikasi	2	Verifikasi	100.00%			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.00%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	6	Jenis	6	Jenis	100.00%			

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	4	Jenis	80.00%	Kurangnya sarana dan prasarana untuk peningkatan fasilitas pelaksanaan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	Dalam rangka Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengadaan ASN, telah diajukan Telaah Staf Nomor: 900/182/VI/BKPSDM/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal permohonan Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pendukung lainnya untuk Fasilitas Seleksi ASN (Gedung, Komputer, Meubelair)	Telah disetujui untuk penambahan anggaran untuk pembelian komputer 30 unit.
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	9	Jenis	9	Jenis	100.00%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	11	Kali	11	Kali	100.00%			
					Jumlah SPPD Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah dan Luar Provinsi.	12	Bulan	12	Bulan	100.00%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.00%			

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	12	Rekening	12	Bulan	100.00%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	24	Jenis	24	Jenis	100.00%			
					Jumlah Jenis Bibit Tanaman	1	Jenis	1	Jenis	100.00%			
					Jumlah Laporan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang Terlayani	12	Laporan	12	Laporan	100.00%			
					Jumlah Tenaga Non PNS	15	Orang	12	Bulan	100.00%			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.00%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	9	Buah/ Tahun	9	Buah/ Tahun	100.00%			
					Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun	4	Buah/ Tahun	100.00%			

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang dipelihara	17	Jenis	17	Jenis	100.00%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	2	Jenis	2	Jenis	100.00%	Rendahnya kualitas bangunan pada gedung CAT sehingga pelaksanaan kegiatan seleksi ASN maupun saat memfasilitasi kegiatan dari SKPD lain atau dari instansi vertikal menjadi nyaman dan maksimal	Dalam rangka Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengadaan ASN, telah diajukan Telaah Staf Nomor: 900/182/VI/BKPSDM/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal permohonan Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pendukung lainnya untuk Fasilitas Seleksi ASN (Gedung, Komputer, Meubelair)	Telah diakomodir pada Anggaran Perubahan TA 2022 dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang akan direncanakan dan diusulkan pada Tahun Anggaran 2023.
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						106.72%			
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						124.22%			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	1	Dok	100.00%			

				Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon ASN yang Diterima	150	Orang	259	Orang	172.67%			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian yang Dipelihara	6	Aplikasi Kepegawaian	6	Aplikasi	100.00%			
					Jumlah Dokumen Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian	4	Dok	4	Dok	100.00%			
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN						96.71%			

				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	1000	Orang	979	Orang	97.90%	Penataan kembali dalam proses penyetaraan jabatan yang mengakibatkan penempatan beberapa jabatan fungsional tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan maupun korelasi antara jabatan dengan tugas dan fungsi dalam perangkat daerah	Penataan terhadap pejabat fungsional sebagai dampak penyetaraan jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan maupun korelasi antara jabatan dengan Tupoksi Perangkat Daerah dikarenakan jabatan fungsional yang tersedia berdasarkan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh MENPAN sangat terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir penempatan pejabat Eselon IV yang terdampak penyetaraan Jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan selain itu belum ditetapkannya PERPRES tunjangan jabatan Fungsional mengakibatkan kita tidak bisa menempatkan PNS tersebut ke dalam jabatan fungsional yang sesuai.	Berkoordinasi dengan Menpan RB dan instansi pembina jabatan fungsional berkaitan dengan ketersediaan JFT dan penetapan JFT yang Baru untuk mengakomodir kebutuhan organisasi sebagai dampak penyetaraan jabatan, serta memfasilitasi para JFT penyetaraan jabatan apabila akan berpindah ke dalam JFT yang lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
					Jumlah Mutasi Keluar / Masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	30	Orang	29	Orang	96.67%			

					Jumlah Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	600	Orang	379	Orang	63.17%			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala	1500	Orang	1,792	Orang	119.47%			
					Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN	600	Orang	774	Orang	129.00%			
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5	Orang	4	Orang	80.00%			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN						98.75%			

				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Diikutkan Assesment	25	Orang	25	Orang	100.00%	1) Guna mendukung mekanisme kerja organisasi yang dinamis, lincah dan profesional dalam pelaksanaan tugas pejabat Fungsional hendaknya menyiapkan regulasi, simplikasi pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional sesuai tuntutan dan jabatan organisasi	Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor :120 Tahun 2021 tentang Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dimana didalam perbup ini terdapat pengaturan tentang Pengembangan Karir diantaranya pejabat Fungsional tertentu	Dengan adanya Perbup Pola karir dan aturan pengelolaan manajemen jabatan fungsional, maka jenjang karir para pejabat fungsional lebih fleksibel dan dinamis. Pejabat fungsional akan dapat mengembangkan karirnya secara terbuka baik dalam jabatan fungsional yang sama maupun berpindah ke jft yang lain sesuai kebutuhan organisasi, bahkan berpeluang sampai dg menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	----	-------	----	-------	---------	--	---	--

								Melakukan evaluasi khusus pada proses mutasi PNS dan disesuaikan dengan Kompetensi dan profesional	Terhadap proses mutasi dan Promosi telah dilakukan review oleh Inspektorat yang menjadi bahan evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kekurangan jumlah dan kualitas PNS yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menduduki jabatan mengakibatkan proses mutasi dan promosi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga terdapat jabatan yang akhirnya harus diduduki oleh PNS secara kompetensi kurang memenuhi syarat akan tetapi secara aturan telah memenuhi syarat	Salah satu solusi yaitu dengan melaksanakan assesment disetiap tahapan mutasi dan promosi. Sehingga dapat mengukur kompetensi PNS sehingga dapat memetakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan Organisasi. Sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan penjenjangan karir PNS, karena akan disusun rencana suksesi dalam setiap jabatan yang menjadi dasar mutasi dan promosi PNS
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	40	Orang	39	Orang	97.50%			
		Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar	2	Orang	2	Orang	100.00%			

				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						107.18%			
				Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Satyalencana	350	Buah	212	Buah	60.57%				
				Jumlah SK CTLN (Cuti di Luar Tanggungan Negara)	4	SK	0	SK	0.00%				
				Jumlah SK Hukuman Disiplin	10	SK	4	SK	40.00%				
				Jumlah SK Izin Perceraian	10	SK	18	SK	180.00%				
				Jumlah SK Pensiun (Janda/Duda/Yatim)	150	SK	202	SK	134.67%				
				Jumlah Surat Cuti (Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting)	140	Surat	319	Surat	227.86%				
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					92.86%				

				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						92.86%			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	0	Orang				Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan Kompetensi Manajerial ASN	Telah dilakukan perencanaan anggaran pada Tahun 2022 untuk pengembangan Kompetensi Manajerial yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia khususnya untuk pengembangan kompetensi manajerial bagi CPNS.	Untuk peningkatan Kompetensi Manajerial bagi pejabat pengawas dan Administrator pada Tahun Anggaran 2023 telah direncanakan dan diusulkan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
					Jumlah Peserta Diklat Teknis	14	Orang	12	Orang	85.71%			
					Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	152	Orang	152	Orang	100.00%			
					Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0	Orang						
					Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	0	Orang						

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2021)

Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya pada fungsi penunjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada (NIHIL).



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB IV
CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN
TUGAS
PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 tidak memiliki atau menerima Tugas Pembantuan.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Tidak Ada.



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB V

PENUTUP



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja di mana Program dan Kegiatan tersebut disusun berdasarkan isu strategis yang berkembang serta dalam rangka pencapaian target Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara, bagi publik sendiri, LPPD akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini kami buat untuk bahan selanjutnya.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630808 198602 1 008